



Tantangan dan Kontroversi Konstitusi dalam Konteks Tata Negara

Aprilia Nabila

Universitas Negeri Semarang

Anik Novita

Universitas Negeri Semarang

Eiffeliqa Torriq

Universitas Negeri Semarang

Neysa Natalie

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: aprilianabila02@students.unnes.ac.id

Abstract. *The constitution is the fundamental rule regarding the governance of a country and is very important because it regulates the relationship between state organs, ensures balanced power, establishes the basic principles of the state, and reflects national identity. The constitution contains rules and principles of political and legal entities, generally referring to the guarantee of rights to its citizens. This research applies a normative juridical research method and uses secondary data sources. Many challenges have faced the Indonesian constitution from the early days of independence until now and possibly in the future. In facing the dynamics and challenges of the constitution in Indonesia, it is important to ensure that the constitution is upheld and respected by all parties. In the context of Indonesia's governance, challenges and controversies related to the constitution have become an inseparable part of the country's political and legal dynamics. However, the implementation of the constitution is often confronted with various challenges and polemics.*

Keywords: *Constitution, Fundamental Governance Rules, Relationship Between State Organs, Balance of Power, Rules and Principles of Political Entities, Rules and Principles of Legal Entities*

Abstrak. Konstitusi adalah aturan dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara, dan sangat penting karena mengatur hubungan antara organ negara, memastikan kekuasaan yang seimbang, menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, dan mencerminkan identitas nasional. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, umumnya konstitusi merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian dengan penelitian yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder. Banyak tantangan yang dihadapi konstitusi Indonesia mulai semenjak awal kemerdekaan hingga sekarang dan bahkan mungkin di masa yang akan datang. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa konstitusi ditegakkan dan dihormati oleh semua pihak. Dalam konteks tata negara Indonesia, tantangan dan kontroversi terkait konstitusi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik dan hukum negara. Namun, pelaksanaan konstitusi tidak jarang dihadapkan pada berbagai tantangan dan polemik.

Kata Kunci: Konstitusi, Aturan Dasar Ketatanegaraan, Hubungan Organ Negara, Keseimbangan Kekuasaan, Aturan dan Prinsip Entitas Politik, Aturan dan Prinsip Entitas Hukum

LATAR BELAKANG

Konstitusi merupakan aturan mendasar tentang tata negara sebuah negara. Konstitusi memiliki peran krusial karena mengatur hubungan antar lembaga negara, menjamin keseimbangan kekuasaan, menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, serta mencerminkan identitas nasional. Konstitusi juga melindungi hak-hak warga negara, menciptakan ketertiban hukum,

mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat kedaulatan negara. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di suatu negara, sehingga semua norma hukum lainnya harus sesuai dengan konstitusi. Alam negara-negara yang bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, istilah “konstitusi” digunakan. Konstitusi dalam bahasa Indonesia adalah istilah yang sama.¹ Bagi para sarjana ilmu politik, konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara namun, dalam praktik, pengertian konstitusi dapat berarti lebih luas dari pengertian Undang-Undang Dasar.²

Hampir setiap negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang (UUD) yang mengatur bagaimana lembaga kenegaraan dibentuk, dibagi wewenang, dan bekerja, serta melindungi hak asasi manusia. Nyaris semua konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan dibagi menjadi jenis-jenis kekuasaan, yang kemudian membentuk lembaga negara. Oleh karena itu, jenis kekuasaan harus ditentukan terlebih dahulu, dan kemudian lembaga negara harus dibentuk untuk melaksanakannya.³ Kekuasaan negara terdiri dari tiga kategori kekuasaan yang terpisah, ketiga kategori ini adalah :

1. Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif)
2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif)

Konstitusi suatu negara adalah standar sistem politik dan hukum yang dibuat oleh pemerintah negara, biasanya ditulis dalam bentuk dokumen. Konstitusi nasional memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum prinsip-prinsip ini mencakup struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban negara.⁴ Banyak tantangan yang dihadapi konstitusi Indonesia mulai semenjak awal kemerdekaan hingga sekarang dan bahkan mungkin di masa yang akan datang. Tantangan yang dihadapi saat ini tersebut yaitu:

1. Konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia
2. Kesenjangan sosial dan ekonomi
3. Korupsi

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi yang ada di Indonesia, sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi ditegakkan dan dihormati oleh semua pihak. Selain itu, konstitusi perlu direformasi untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga konstitusi dapat terus menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Reformasi konstitusi harus dilakukan secara konstitusional dan

¹ Universitas Islam An Nur Lampung “*Konstitusi: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tujuan, dan Nilai-nilai*”

² Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si., Dkk., “*Teori Dan Hukum Konstitusi*” (Jakarta : Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi) Tahun 2004 Hal. 7

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi “*Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia*”

⁴ Manan bagir, “*Teori dan Politik Konstitusi*” (Yogyakarta : FH UII Press) Tahun 2003. Hal. 23

transparan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu, memperkuat lembaga yang bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi seperti lembaga pengawasan, lembaga praperadilan, dan lembaga legislatif.⁵

KAJIAN TEORITIS

Dalam konteks tata negara Indonesia, tantangan dan kontroversi terkait konstitusi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik dan hukum negara. Konstitusi Indonesia, sebagai pijakan utama negara, memiliki peran sentral dalam memastikan stabilitas politik dan sosial serta melindungi hak-hak individu. Namun, pelaksanaan konstitusi tidak jarang dihadapkan pada berbagai tantangan dan polemik. Dalam analisis ini, kami akan menekankan pada tantangan dan kontroversi yang terkait dengan konstitusi yang dihadapi oleh Indonesia, serta strategi-strategi yang mungkin digunakan untuk menangani permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepastakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, arti dari data sekunder itu sendiri merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi ilmiah, materi kuliah, sumber informasi dari internet, dan pandangan para ahli atau doktrin.

Dalam artikel ini penulis juga menggunakan metode literatur atau studi kepastakaan untuk menemukan data atau informasi penelitian melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di internet maupun perpustakaan. Termasuk dalam penelitian ini adalah sifat analisis deskriptif. Ini berarti bahwa data diuraikan secara teratur, dan pembaca diberikan pemahaman dan penjelasan untuk memahami artikel dengan baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Indonesia, yang diresmikan pada 18 Agustus 1945, telah menghadapi berbagai tantangan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas dan perkembangan negara, tetapi juga menunjukkan bahwa konstitusi adalah dokumen yang hidup, yang harus terus-menerus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berubah.

⁵ Pumpunan, "Dinamika dan Tantangan Konstitusi Indonesia"

1. Konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia

Konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia adalah isu yang sering muncul di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, konstitusi menjamin hak-hak asasi manusia dalam berbagai bentuk, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak untuk hidup dan tidak disiksa, serta hak untuk mendapatkan keadilan. Namun, dalam praktiknya kebijakan pemerintah terkadang dapat bertentangan dengan hak-hak ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kasus di mana pemerintah memberlakukan undang-undang atau peraturan yang membatasi kebebasan berekspresi. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk menuntut individu yang dianggap menghina pejabat pemerintah atau menyebarkan berita palsu.

Pada tanggal 21 April 2008, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE/UU ITE). Undang-Undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Undang-Undang ITE, baik dalam yurisdiksi Indonesia maupun diluar yuridiksi Indonesia, dan yang merugikan kepentingan negara, diberi yurisdiksi oleh undang-undang ini. Dengan berkembangnya media informasi dan transaksi elektronik, berbagai macam tindak pidana baru muncul.⁶ Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seringkali menyalahgunakan Undang-Undang ITE dengan menyerang balik dan melaporkan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, Undang-Undang ITE ditafsirkan sebagai undang-undang yang mengakibatkan pasal karet.

Selama beberapa tahun terakhir, UU ITE telah menjadi sorotan utama dalam diskusi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinilai membatasi kebebasan berekspresi dengan memberikan hukuman kepada individu yang dianggap menghina pejabat pemerintah atau menyebarkan berita palsu. Namun, sejumlah Ahli Hukum dan Akademisi menilai bahwa revisi UU ITE yang telah dilakukan masih belum cukup untuk mengatasi isu kebebasan berekspresi. Mereka mengusulkan perubahan yang lebih signifikan agar UU ITE sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam situasi seperti ini, konstitusi berfungsi sebagai alat utama untuk melindungi hak-hak tersebut dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap dalam batas-batas konstitusional. Konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu, dengan menyediakan mekanisme hukum untuk meninjau dan memperbaiki kebijakan yang melanggar hak asasi manusia.

⁶ JDIH Kab. Bolaang Mongondow "Kajian Analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" Artikel Hukum

Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi untuk memastikan prinsip konstiusionalitas hukum. Dengan cara yang sama, negara-negara yang menerima pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraannya bertindak. Fungsi pengujian undang-undang tidak dapat lagi dihindari dalam ketatanegaraan indonesia untuk menjaga konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa supremasi konstitusi bukan lagi supremasi parlemen.⁷ Maka dalam hal ini berarti Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah Undang-Undang ITE telah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Jika terdapat perselisihan antara lembaga negara terkait penerapan Undang-Undang ITE Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan sengketa tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan terkait pembubaran partai politik. Ketika ada perselisihan atau tindakan hukum yang berkaitan dengan partai politik yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, maka Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan terkait hal ini.

2. Kesenjangan sosial dan ekonomi

Kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan permasalahan global yang melanda banyak negara, terutama Indonesia. Seringkali kondisi kesenjangan sosial dan ekonomi memperburuk ketika kebijakan pembangunan diterapkan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Pemerintah Indonesia harus menangani masalah ini. Faktor ketidakmerataan distribusi, penyebab semua kesenjangan yang ada baik itu kesenjangan pendidikan maupun sosial ekonomi. Ini berarti bahwa beberapa kelompok masyarakat mendapatkan manfaat sementara yang lain dirugikan.

Konstitusi Indonesia menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi implementasinya masih banyak yang tertinggal. Ketimpangan sosial dan ekonomi tetap menjadi tantangan utama, dengan perbedaan signifikan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Mensejahterakan masyarakat secara merata dan adil adalah tujuan akhir dari semua upaya ekonomi. Hingga saat ini, masih ada masalah dengan pendistribusian pendapatan. Antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih ada banyak perbedaan. Kesejahteraan masyarakat, tujuan ekonomi, akan terhambat oleh kesenjangan sosial. Masalah ini dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas, kemiskinan, dan penyalahgunaan narkoba jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, distribusi pendapatan yang adil dalam masyarakat sangat penting. Redistribusi pendapatan adalah penyebaran kembali pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ini adalah salah satu bentuk

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi"

jaminan sosial yang diberikan negara kepada masyarakat. Banyak orang salah mengira jaminan sosial adalah biaya. Redistribusi pendapatan bukan hanya tindakan manusiawi, tetapi juga efisien secara ekonomi. Kita hidup dalam masyarakat yang saling bergantung, dan uang yang kita miliki tidak akan bermanfaat jika orang lain tidak memiliki uang dan daya beli yang setara. Tanpa perputaran uang, dunia tidak akan bisa berfungsi dan berkembang.

Selain adanya kebijakan redistribusi terdapat peningkatan infrastruktur dan layanan publik, yang mana investasi dalam infrastruktur dan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dikenal sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik, inovatif, dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁸ di Indonesia mengembangkan layanan publik yang inovatif dan efektif di era digital merupakan tantangan besar, tetapi juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah harus meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia, membangun budaya inovasi, menerapkan prinsip desain yang berfokus pada pengguna, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan layanan publik.

Kemudian partisipasi masyarakat juga memegang peran penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warganya. Dalam sistem demokrasi melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik adalah cara efektif untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif berkeadilan, dan berkelanjutan.⁹ Dengan melibatkan masyarakat yang mungkin terkena dampak kebijakan serta kelompok kepentingan, para pembuat kebijakan dapat memahami pandangan, kebutuhan, dan aspirasi dari masyarakat atau kelompok tersebut untuk dituangkan ke dalam konsep kebijakan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dirancang oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan kesejahteraan bersama

3. Korupsi

Selama bertahun-tahun, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara, dan hukuman bagi mereka yang melakukan korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara, dan hukuman bagi mereka yang melakukan korupsi telah diperketat. Namun, berita tentang korupsi

⁸ Dahyar Daraba dkk, "Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia" Volume 5 No.1

⁹ NEXT

masih muncul hampir setiap hari. Istilah Latin *corruptio* adalah asal kata korupsi. Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*. Kata "korupsi" tampaknya berasal dari bahasa Belanda.¹⁰ Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹¹ Korupsi mengganggu pemerintahan yang efektif dan merugikan masyarakat. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin pemberantasan korupsi, praktiknya perlu diperkuat. Oleh karena itu, konstitusi menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk memerangi korupsi bekerja dengan baik. Banyak komentar negatif terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Rasa sakit, frustrasi, keputusan, kemarahan, dan emosi negatif lainnya terkait dengan perilaku demokrasi yang terus-menerus dan tersebar luas. Selain itu tersangka, terdakwa dan bahkan terpidana berperilaku seolah-olah mereka mengambil bagian dalam *show of force*.¹²

Karena korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas pemerintah dan merugikan masyarakat secara keseluruhan, konstitusi yang baik harus mencakup prinsip dan prosedur yang mendorong pemerintahan bebas dari korupsi. Sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi ini diterapkan secara efektif melalui pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat yang aktif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi saat menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil :

1. Prinsip Pemerintahan yang Transparan : Sebagai dasar sistem pemerintahan, konstitusi dapat menerapkan prinsip pemerintahan yang transparan. Ini dapat mencakup kewajiban pemerintah untuk memberikan akses terbuka terhadap informasi publik, termasuk keputusan tentang kebijakan, anggaran, dan tindakan pemerintah lainnya. Konstitusi juga dapat mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
2. Mekanisme Akuntabilitas : Sebagai dasar sistem pemerintahan, konstitusi dapat menerapkan prinsip pemerintahan yang transparan. Ini dapat mencakup kewajiban pemerintah untuk memberikan akses terbuka terhadap informasi publik, termasuk keputusan tentang kebijakan, anggaran, dan tindakan pemerintah lainnya. Konstitusi juga dapat mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
3. Perlindungan hukum: Konstitusi dapat melindungi pengungkap korupsi, juga dikenal sebagai *whistleblower*. Hal ini dapat mendorong orang untuk melaporkan pelanggaran korupsi tanpa

¹⁰ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7

¹¹ WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524

¹² Waluyo, Bambang. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol. 1 No. 2, Desember 2014 : 169-182

khawatir dihukum. Selain itu, konstitusi dapat memastikan sistem peradilan independen dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memproses kasus korupsi secara adil dan tanpa intervensi politik.

4. Pengaturan keuangan publik: Konstitusi dapat melarang praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi dalam pengelolaan keuangan publik. Ini dapat mencakup penyusunan anggaran yang terbuka dan partisipatif, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik, dan audit independen terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
5. Partisipasi Publik: Konstitusi dapat mendorong partisipasi publik yang aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ini dapat dicapai dengan menyediakan mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme pengaduan, yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi bagaimana pemerintah bertindak. Konstitusi juga dapat memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan petisi atau meminta pemerintah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.¹³

Korupsi memiliki banyak efek negatif yang mempengaruhi masa depan Indonesia, terutama generasi muda. Anak-anak tumbuh dengan pribadi antisosial dalam masyarakat dimana korupsi sudah menjadi hal biasa. Ketika generasi berikutnya menganggap korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, mereka akan menjadi terbiasa dengan tindakan tidak bertanggung jawab dan tidak jujur dalam perkembangan pribadinya. Masa depan suatu negara dapat dibayangkan dengan jelas jika generasi mudanya menghadapi kondisi seperti itu.¹⁴

Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak bagi generasi muda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa dampak utama korupsi terhadap generasi muda:

1. Pendidikan Yang Terbengkalai

Kualitas Pendidikan yang menurun: Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, menyediakan bahan ajar berkualitas tinggi, dan melatih guru malah diselewengkan. Akibatnya, ada kurangnya sarana pendidikan dan kualitas pembelajaran menurun. Akses Pendidikan Terbatas: Banyak siswa dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan karena beasiswa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak.

2. Ketidakadilan dan Ketidakpercayaan

Rasa Ketidakadilan: Jika generasi muda menyaksikan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan, mereka akan menjadi kecewa dan putus asa. Mereka mungkin merasa bahwa usaha keras dan kejujuran tidak dihargai, sementara orang yang korup mendapatkan keuntungan.

¹³ Aslamiah, Suhayy Batul, Zainal Abidin Pakpahan. *Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis*. Jurnal of Education. Vol. 06. No. 02 Januari-Februari 2024. Hal. 11760-11769

¹⁴ Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia : Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3, November 2018. Hlm. 251

3. Moral dan Etika yang Terkikis

Menurunnya Nilai-Nilai Etika: Jika korupsi dianggap normal dan diterima masyarakat, generasi muda mungkin tumbuh dengan pandangan bahwa tindakan tidak adil dan penyalahgunaan kekuasaan adalah hal yang wajar. Teladan Buruk: Generasi muda menerima teladan buruk dari pemimpin dan figur masyarakat yang korup. Mereka mungkin meniru perilaku buruk ini karena menganggapnya sebagai cara untuk sukses. Potensi yang terbatas. Pengangguran dan Kesempatan Kerja: Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja bagi generasi muda. Dengan ekonomi yang lemah, perusahaan tidak mampu membuka banyak lowongan kerja, dan lapangan pekerjaan yang ada pun mungkin diisi berdasarkan koneksi daripada kualifikasi. Kesenjangan Sosial: Korupsi memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Generasi muda dari latar belakang ekonomi rendah akan merasa sulit untuk memperbaiki kondisi hidup mereka karena peluang yang ada lebih banyak diberikan kepada mereka yang memiliki koneksi atau kemampuan membayar suap.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mencapai tujuan nasional, pemberantasan korupsi sangatlah penting. Kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus dikombinasikan dengan strategi yang menyeluruh, integral, dan holistik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika kita melihat faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, kita dapat mengatakan bahwa korupsi melibatkan hal-hal seperti manusia, regulasi, birokrasi, keinginan, politik, komitmen, penegakan hukum yang konsisten, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, secara umum, pendekatan yang digunakan mencakup elemen-elemen berikut:

a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;

Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara adalah salah satu strategi yang sangat penting dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi yang profesional dan berintegritas. Selain itu, pengembangan budaya anti korupsi masyarakat melalui pendidikan dan kampanye antikorupsi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi di masyarakat.

Untuk mencegah korupsi, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terintegrasi sangat penting. Penegakan hukum yang masuk ke dalam budaya masyarakat dan birokrasi dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Selain itu, pendidikan formal dan kedinasan harus dirancang untuk memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti Pancasila, agar upaya untuk meningkatkan integritas dan etika aparatur negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Etika penyelenggara negara yang baik sangat diperlukan untuk mencegah korupsi. Penyelenggara negara yang berintegritas dan beretika dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga tingkat korupsi akan menurun. Oleh karena itu, meningkatkan integritas dan etika penyelenggara negara adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi di Indonesia.

b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;

Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi adalah salah satu strategi yang sangat penting dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara harus dilakukan secara simultan, sejak di bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan, untuk mencegah korupsi. Pengembangan budaya anti korupsi masyarakat melalui pendidikan dan kampanye antikorupsi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi di masyarakat. Masyarakat yang beretika dan berintegritas dapat turut serta dalam pengawasan dan pengawalan perencanaan dan realisasi anggaran pemerintahan. Penegakan hukum yang terpadu dengan budaya masyarakat dan birokrasi dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, pendidikan formal dan pendidikan kedinasan harus diorientasikan untuk memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti Pancasila, agar upaya membangun integritas dan etika aparatur negara dapat diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi di Indonesia.

c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat;

Penguatan budaya anti korupsi masyarakat adalah salah satu strategi yang sangat penting dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penyuluhan hukum dan pendidikan anti korupsi harus dilakukan sejak dini di bangku sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang korupsi, serta berperan sebagai pengawas dan pengawalan perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah.

Keteladanan dan kampanye anti korupsi yang dilakukan dalam berbagai media terutama media massa dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang korupsi. Kampanye ini harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang korupsi. Nilai-nilai ini harus ditanamkan melalui

pendidikan dan kampanye anti korupsi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan budaya anti korupsi masyarakat adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi di Indonesia.

d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu adalah salah satu strategi yang sangat penting dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Penegak hukum harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan hukum dengan tegas dan konsisten, serta memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengawal perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah.

Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak ambigu. Penegakan hukum yang tegas dapat membantu mencegah korupsi dengan cara menghukum para pelaku korupsi secara tegas dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan pentingnya mencegah korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dapat membantu mencegah korupsi dengan cara menghukum para pelaku korupsi secara konsisten dan tidak berbeda-beda.

Penegakan hukum yang terpadu harus dilakukan dengan cara yang terpadu dan tidak terisolasi. Penegakan hukum yang terpadu dapat membantu mencegah korupsi dengan cara menghukum para pelaku korupsi secara terpadu dan tidak terisolasi. Penegakan hukum yang terpadu juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan pentingnya mencegah korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstitusi merupakan aturan dasar yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memiliki peran penting dalam mengontrol bagaimana organ-organ negara berinteraksi, memastikan bahwa kekuasaan seimbang, serta melindungi hak-hak warga negara. Meskipun konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi, banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya, seperti konflik antara pemerintahan dan hak asasi manusia, kesenjangan ekonomi dan sosial, dan korupsi. Sangat penting untuk melakukan reformasi konstitusional yang sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta untuk memperkuat lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan terhadap konstitusi.

Konstitusi Indonesia memang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti konflik antara hak asasi manusia dan kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta korupsi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, peran konstitusi sebagai dokumen yang hidup sangat penting. Konstitusi tidak hanya memberikan kerangka kerja hukum, tetapi juga harus terus-menerus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang berubah. Konflik antara hak asasi manusia dan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan Undang-Undang ITE, menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap regulasi yang ada agar sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam menjaga konstitusi dan menyelesaikan sengketa terkait penerapan undang-undang.

Kesenjangan sosial dan ekonomi juga merupakan tantangan serius yang harus ditangani. Implementasi konstitusi dalam hal ini melibatkan redistribusi pendapatan, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan publik yang efisien. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Konstitusi Indonesia berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu serta memastikan kebijakan tetap dalam batas konstitusional untuk mencapai tujuan nasional yang adil dan sejahtera. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, konstitusi Indonesia dapat terus berfungsi sebagai dokumen hidup yang adaptif dan relevan dalam menjamin hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberantasan korupsi untuk masa depan yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Universitas An Nur Lampung *“Konstitusi: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tujuan dan nilai-nilai”*
Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si., Dkk, *“Teori Dan Hukum Konstitusi”* (Jakarta : Rajawali
Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi) Tahun 2004 Hal.7
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi *“Sejarah dan
Perkembangan Konstitusi di Indonesia”*
- Manan Bagir, *“Teori dan Politik Konstitusi”* (Yogyakarta : FH UII Press) Tahun 2003. Hal.32
Pumpunan, *“Dinamika dan Tantangan Konstitusi Indonesia”*
- JDIH Kab. Bolaang Mongondow *“Kajian Analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik” Artikel Hukum*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, *“Peran dan
Fungsi Mahkamah Konstitusi”*
- Gamal Thabroni *“Redistribusi Pendapatan Nasional: Pengertian, Program & Alternatif”*
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, hlm. 18

- Dahyar Daraba dkk, “Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia” Volume 5 No.1
- Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 7
- WJS Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524
- Waluyo , Bambang. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* : Jurnal Yuridis. Vol. 1 No. 2, Desember 2014 : 169-182
- Aslamiyah, Suhaiy Batul, Zainal Abidin Pakpahan. *Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis*. Jurnal of Education. Vol. 06. No. 02 Januari-Februari 2024. Hal. 11760-11769
- Setiadi, Wicipto. “Korupsi Di Indonesia : Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3, November 2018. Hlm. 251